

Ketimpangan Ekonomi dan Kebijakan Pemerataan Pembangunan Di Provinsi Banten

Nidya Waras Sayekti

Penguatan Kapasitas Keuangan Negara Melalui Revisi UU Pengelolaan PNBPNBP

Ariesy Tri Mauleny

Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Rastri Paramita dan Ratna Christianingrum

Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Indonesia

Adhi Prasetyo dan Ade Nurul Aida

Analisis Hubungan Belanja Pemerintah Fungsi Pariwisata Terhadap Produk Domestik Bruto Regional (PDRB)

Dahiri dan Marihot Nasution

SUSUNAN DEWAN REDAKSI
JURNAL BUDGET

Penanggungjawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Slamet Widodo, S.E., M.E.

Redaktur

Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Dahiri, S.Si., M.Sc

Rastri Paramita, S.E., M.M.

Editor dan Layout

Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Sekretariat

Mardi Harjo, S.E., M.Si.

Achmad Ridho, S.E.

Memed Sobari

Musbiyatun

Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di jurnal ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

Buletin ini diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai isu-isu keuangan negara terkini yang dapat menjadi dukungan substansi bagi pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPR RI.

Jurnal Budget

Vol. 2, No. 1, 2017

ISSN 2541-5557

Pusat Kajian Anggaran

Badan Keahlian DPR RI

Halaman ini sengaja dikosongkan

PENGANTAR REDAKSI

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Jurnal Ilmiah Jabatan Fungsional Analisis APBN yang bernama "**Budget**" kembali terbit dan memasuki volume kedua. Jurnal Budget Volume 2 Edisi 1 merupakan hasil dari proses redaksional dan penulisan yang dimulai dari awal tahun 2017 hingga terbit pada bulan Juli 2017.

Terbitan Jurnal Budget ini merupakan hasil kerja redaksi, para Analisis APBN dari Pusat Kajian Anggaran, para Peneliti dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI sebagai penulis utama, dan tentunya pimpinan Pusat Kajian Anggaran BKD DPR RI beserta jajarannya. Redaksi tetap memberikan Kesempatan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk ikut memberikan masukan dan menentukan tata kelola yang terbaik serta ikut berkontribusi dalam jurnal **Budget** ini.

Jurnal **Budget** dalam setiap terbitan berisi materi yang membahas seputar permasalahan dalam keuangan negara yang merupakan lingkup tugas dari Jabatan Fungsional Analisis APBN. Sebagai output yang diterbitkan di lingkungan parlemen, yaitu MPR/DPR/DPD RI maka diharapkan materi yang disajikan didalamnya, meskipun bersifat ilmiah dan pembahasan keilmuan/akademik, namun tetap mampu menjadi sumber informasi, memberikan kontribusi data-data hingga rekomendasi bagi tugas dan kewenangan anggota parlemen, khususnya Anggota DPR RI.

Meskipun telah mencapai volume kedua, jurnal kami pastilah tak luput dari kekurangan. Untuk itu, selanjutnya Redaksi mengharapkan masukan terbuka dari semua pihak atau stakeholders, demi perbaikan dan peningkatan kualitas jurnal sebagaimana harapan kita semua.

Redaksi berharap semoga artikel-artikel ilmiah yang termuat dalam jurnal ini mampu memberikan manfaat bagi analisis APBN, peneliti, anggota parlemen, maupun pihak-pihak akademisi dan profesional yang mempunyai minat dalam penelitian terkait isu-isu keuangan negara

Dewan Redaksi

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jurnal Budget

Vol. 2, No. 1, 2017

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi.....	iii
Daftar Isi.....	v
Ringkasan.....	vi
Ketimpangan Ekonomi dan Kebijakan Pemerataan Pembangunan Di Provinsi Banten	
<i>Nidya Waras Sayekti</i>	1
Penguatan Kapasitas Keuangan Negara Melalui Revisi UU Pengelolaan PNB	
<i>Ariesy Tri Mauleny</i>	11
Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	
<i>Rastri Paramita dan Ratna Christianingrum</i>	32
Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Indonesia	
<i>Adhi Prasetyo dan Ade Nurul Aida</i>	51
Analisis Hubungan Belanja Pemerintah Fungsi Pariwisata Terhadap Produk Domestik Bruto Regional (PDRB)	
<i>Dahiri dan Marihot Nasution</i>	62

KETIMPANGAN EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI BANTEN

Nidya Waras Sayekti

Ringkasan

Provinsi Banten merupakan daerah otonomi hasil pemekaran dari Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2000. Provinsi Banten memiliki tingkat koefisien gini (*gini ratio*) yang berfluktuasi selama tahun 2012-2016 dengan angka tertinggi pada tahun 2014 sebesar 0,424 dan cenderung menurun pada tahun 2016 sebesar 0,392. Ketidakseimbangan pertumbuhan (*unbalanced growth*) antara wilayah Banten Selatan dan Banten Utara mempertajam kesenjangan kesejahteraan sosial-ekonomi (disparitas) di Provinsi Banten. Padahal salah satu tujuan pembangunan wilayah adalah mengurangi ketimpangan antarwilayah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif guna memberikan analisis yang komprehensif mengenai ketimpangan ekonomi dan kebijakan pemerataan pembangunan di Provinsi Banten.

Berdasarkan hasil analisis salah satu hambatan yang dialami Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Banten dalam melaksanakan pembangunan yaitu kondisi geografis. Oleh karena itu, Pemda Provinsi Banten menerapkan strategi pembangunan jangka panjang dengan memaksimalkan potensi daerah tertinggal, antara lain dengan menjadikan daerah bagian selatan sebagai kawasan minapolitan. Untuk mendukung hal tersebut dan menekan ketimpangan ekonomi yang terjadi, kiranya pemda perlu meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui peningkatan sarana dan prasarana transportasi darat, udara, dan laut yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan baru.

PENGUATAN KAPASITAS KEUANGAN NEGARA MELALUI REVISI UU PENGELOLAAN PNBP

Ariesy Tri Mauleny

Ringkasan

Salah satu tugas dan fungsi pemerintah di bidang keuangan negara adalah pengelolaan penerimaan negara sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Upaya menjaga stabilitas fiskal melalui peningkatan penerimaan negara belum sepenuhnya didukung oleh penerimaan pemerintah non-pajak yang optimal atau yang biasa disebut pengelolaan PNBP. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian PNBP yang masih fluktuatif dan berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi dan pencapaian indikator pembangunan belum terlihat dirasakan. Ditambah dengan berbagai permasalahan yang terjadi dalam 20 tahun pengelolaan PNBP sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 yang menuntut selesainya RUU Pengelolaan PNBP. Hal ini membuat penelitian ini menarik untuk diteliti. Penggunaan metodologi penelitian analisis kualitatif dan pendekatan deskriptif diharapkan dapat menggambarkan pemetaan masalah pengelolaan PNBP secara komprehensif dan menyajikan isu strategis dalam pembahasan RUU Pengelolaan PNBP sehingga penguatan keuangan negara dapat dicapai melalui revisi manajemen PNBP. Keberadaan RUU tentang PNBP diharapkan juga dapat memberikan *legal clarity*, *legal certainty*, *legal enforceability* dan *legal effectiveness* bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan desentralisasi yang berkeadilan, efektif dan efisien. Pembahasan RUU PNBP harus melibatkan pemerintahan daerah yang menjadi daerah penghasil PNBP serta menitikberatkan pada manajemen pengelolaannya.

PENGARUH INVESTASI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA

Rastri Paramita dan Ratna Christianingrum

Ringkasan

Perkembangan investasi selama 5 tahun terakhir (2012-2016) mengalami tren yang meningkat. Namun sumbangan investasi terhadap pertumbuhan Indonesia masih belum sebesar dari konsumsi agregat. Padahal *multiplier effect* investasi dapat menyediakan lapangan kerja baru, sehingga menyerap tenaga kerja, peningkatan pendapatan per kapita, kemudian, tingkat konsumsi juga mengalami peningkatan dan akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja secara nasional, dengan menggunakan data periode 2012 – 2016.

Berdasarkan hasil analisis, jumlah penyerapan tenaga kerja Indonesia dipengaruhi oleh nilai investasi dan jenis sektor industri. Akan tetapi, tidak semua sektor industri mempengaruhi penyerapan tenaga kerja Indonesia. Sektor-sektor yang memberikan pengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah sektor tanaman pangan dan perkebunan; pertambangan; industri logam dasar barang logam, mesin dan elektronik; makanan; serta industri tekstil.

Merujuk pada hasil penelitian, pemerintah perlu menetapkan sektor unggulan berdasarkan kemampuan menyerap tenaga kerja serta kesesuaian profil tenaga kerja, menciptakan peraturan perundang-undangan yang tidak tumpang tindih dan tidak multitafsir sehingga memudahkan investor untuk berinvestasi, terus mendorong iklim investasi yang baik, memperkuat koordinasi antara K/L dalam mendukung iklim investasi serta mempersiapkan tenaga kerja yang berpengetahuan atau memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan sektor unggulan.

PENGARUH PAD, DAU, DAK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN PADA KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

Adhi Prasetyo dan Ade Nurul Aida

Ringkasan

Desentralisasi menuntut semua pihak untuk melakukan perubahan dan pemahaman tentang tugas dan kewenangan pemerintahan daerah. Dengan demikian daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di daerah.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Indonesia dengan menggunakan metode analisis jalur/*path analysis* dengan data sekunder berupa panel yang terdiri atas 33 provinsi yang mencakup 441 kabupaten/kota di Indonesia dengan kurun waktu 2012-2014. Data tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU, DAK, serta pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) PAD dan DAU berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di tiap kabupaten/kota daerah namun DAK tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. (2) PAD, dan DAU berpengaruh terhadap kemiskinan, namun DAK tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di Indonesia. (3) secara tidak langsung PAD, dan DAU berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi.

ANALISIS HUBUNGAN BELANJA PEMERINTAH FUNGSI PARIWISATA TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO REGIONAL (PDRB)

Dahiri dan Marihot Nasution

Ringkasan

Pariwisata merupakan sektor industri yang sedang diunggulkan di Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, belanja fungsi pariwisata hanya dialokasikan sedikit karena terbatasnya ruang fiskal pemerintah. Studi ini menguji hubungan antara besaran alokasi belanja fungsi pariwisata pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pengujian dilakukan dengan menggunakan data dari tahun 2010 hingga 2015 untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk melihat besarnya dampak belanja pemerintah, khususnya di bidang pariwisata, pada pertumbuhan ekonomi.

Dari hasil pengujian korelasi sederhana, diketahui bahwa belanja fungsi pariwisata berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini menandakan bahwa pemanfaatan dana untuk pariwisata mampu untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat meskipun dengan alokasi yang terbatas. Meskipun begitu, perlu optimalisasi pemanfaatan dana belanja pariwisata yang lebih baik agar manfaat dan dampak dari industri pariwisata dapat lebih dirasakan oleh masyarakat khususnya di bidang ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi tersebut dapat dilakukan pemerintah dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan di sektor pariwisata. Dengan optimalisasi pelaksanaan kebijakan tersebut maka diharapkan hasil dari pembangunan pariwisata dapat diperoleh dampak positif tidak hanya bagi perekonomian daerah namun juga bagi perekonomian nasional.